

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi politik yang dipacu oleh digulingkannya rezim pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang telah membukakan impian masyarakat guna memiliki pemerintahan yang lebih baik. Sistem pemerintahan di Indonesia pada saat pemerintahan Presiden Soeharto dinilai telah mencederai demokrasi itu sendiri, hal tersebut dikarenakan pada saat itu demokrasi dinilai sangat monopolistik, otoriter, dan militeristik (Arifin, 2008, hal. 15)

Menurut (Wibowo, 2011, hal. 27-31) menjelaskan bahwa ada 4 pola suksesi kepemimpinan, yakni *Pertama*, Suksesi Dinastik merupakan suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara penunjukan atau turun-temurun, jadi pemimpin yang memimpin tersebut memperolehnya dengan diwariskan. *Kedua*, Pemilu merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan kepemimpinan tertentu, jadi pemilu ini dinilai sebagai suksesi yang paling demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. *Ketiga*, Kudeta merupakan pergantian kepemimpinan yang dilakukan dengan mendepak pemimpin sebelumnya kemudian menggantikannya dengan pemimpin yang baru. *Keempat*, *People Power* merupakan suksesi kepemimpinan yang dilakukan dengan melibatkan kekuatan keamanan atau fisik untuk menegakkan kekuasaan politik. Reformasi telah mengubah suksesi kepemimpinan Indonesia yang dulunya cenderung oligarki atau dinasti menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan Pemilu seperti saat ini merupakan bukti bahwa Indonesia sekarang menggunakan model suksesi kepemimpinan yang demokratis.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum). Kemudian, (Khoiri, 2017, hal. 134) menjelaskan bahwa Pemilihan umum merupakan representasi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari segala prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi menerima segala keputusan mengenai penyelenggaraan negara yang dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat, dan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya, tujuan yang diharapkan tercapai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum secara langsung ialah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama

kepada masyarakat dalam berpartisipasi dengan mengusung calon pemimpin ataupun saat memilih pemimpin-pemimpin yang akan dipilih (Tutik, 2011)

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang lebih demokratis ini memberikan jalan dan kesempatan bagi para aktor baru untuk menjajaki kehidupan perpolitikan, sehingga para aktor lokal yang memiliki wawasan kepemimpinan memiliki ruang untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik setelah dalam waktu yang cukup lama terbelenggu dalam kehidupan politik yang sentralistik (Mutmainnah, 2014, hal. 13)

Tampilnya aktor elit politik lokal yang kemudian berhasil memenangkan kursi perpolitikan adalah bukti bahwa kekuatan politik non parpol juga sangat kuat dalam pemilu. Kekuatan elit lokal tersebut terdapat dalam diri seorang kiai, hal tersebut dikarenakan kiai memiliki pengaruh besar dalam lingkungan masyarakat bahkan kiai seringkali menjadi rujukan dalam berbagai bidang yang tidak hanya berkutat dengan hal yang bersifat spiritual saja, akan tetapi hingga persoalan sosial hingga persoalan politik yang kemudian masyarakat mempercayai kiai untuk menjadi pemimpin. Kiai menjadi pemeran utama dalam memainkan peran untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satu faktor yang membuat kiai memiliki kekuatan dalam menggiring dukungan dari masyarakat adalah karena kiai dikenal sebagai tokoh karismatis yang memiliki otoritas. Otoritas yang melekat dalam diri kiai ini yang menjadi daya tarik terhadap masyarakat yang kemudian dibungkus oleh legitimasi agama (Patoni, 2007, hal. 180).

Keterlibatan kiai dalam panggung perpolitikan menarik kiai lainnya yang memiliki visi sama yang bersumber dari almamater yang sama atau guru yang sama, tentunya mereka juga ikut andil dalam kegiatan politik kiai yang didukungnya (Sholichin, 2009, hal. 38). Dengan kata lain, kiai-kiai tersebut memiliki peran sebagai *vote getter* karena mereka terlibat dalam menyuarakan pilihannya dan melalui kepopulerannya mampu mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Keikutsertaan kiai dalam kontestasi politik sebenarnya memang merupakan peristiwa lama dari kehidupan perpolitikan nasional setelah era Reformasi. Sejak Orde Baru rezim pemerintahan Presiden Soeharto berakhir pergerakan politik kiai kembali mewarnai panggung perebutan kursi panas pemerintahan. Tentunya, kondisi ini mengundang simpati dari berbagai masyarakat dari berbagai golongan hingga pada level masyarakat *peripheral*, ditambah elit lokal yang berjudul “kiai” tersebut

terkenal sebagai pemimpin dalam kepercayaan yang masyarakat yakini (Syarif, 2016, hal. 295)

Fenomena keikutsertaan kiai sebagai elit lokal ini menjadi fakta yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Hampir seluruh daerah menempatkan kiai dalam berbagai ruang pemerintahan yang berjalan akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat dilihat beberapa peristiwa terkait politik seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pengisian anggota DPRD, rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan. Di Madura, para kiai mayoritas banyak yang berhasil masuk dalam dunia perpolitikan diantaranya K.H Kholilurrahman (Mantan Bupati Kabupaten Pamekasan Periode 2008-2013) beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan, K.H Unais Ali Hisyam (Komisi VI DPR RI 2009-2019, Ketua Komisi B DPRD Sumenep 2004-2009, dan Ketua Komisi E DPRD Sumenep 1999) beliau juga merupakan salah satu dewan pengasuh Pondok Pesantren Ahlussunnah Waljamaah Jungtoro Laok Ambunten Sumenep, K.H Busyro Karim (Mantan Bupati Kabupaten Sumenep 2 Periode 2010-2015 dan 2015-2020) beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyyah Braji Gapura Sumenep. Beberapa tokoh diatas dapat dijadikan gambaran bahwa Madura memiliki pemimpin-pemimpin seorang kiai dengan latar belakang dari Pesantren (Herpanto, 2018)

Kiai memiliki kedudukan khusus di lingkungan masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya adagium lokal yang berbunyi : *Bhuppa' Bhappu', Ghuru, Rato* (Bapak-Ibu, Guru, dan Pemerintah) adagium tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan penghormatan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terciptanya adagium ini tidak terlepas dari kepercayaan dan ketaatan masyarakat pada agama yang membuat mereka melakukan penghormatan dan ketaatan terhadap sosok kiai yang dianggap sebagai mahaguru dalam masyarakat Madura. Gelar kiai diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang memiliki keistimewaan yang dapat terlihat dari luasnya wawasan keilmuan dalam hal agama serta sikap ketulusan dan keikhlasan yang dicerminkan dalam setiap aktivitasnya (Syarif, 2016, hal. 295)

Di Madura yang masih kental religiusitasnya, kiai merupakan salah satu elit yang memiliki kedudukan spesial dalam masyarakat dan memiliki pengaruh besar atas perkembangan masyarakat. Kiai menjadi salah satu elit penting dalam masyarakat karena dianggap memiliki keluasan pengetahuan islam, bahkan secara teologis juga dipandang ssebagai sosok pewaris para Nabi atau *waratsat al-anbiya* (Faridl, 2007, hal. 239). Kiai menjadi kekuatan karena telah berhasil mengorganisir masyarakat dari

berbagai kalangan untuk mempercayai dirinya sebagai seorang pemimpin melalui keterikatan intelektual dan moral keagamaan yang ditunjukkannya sehingga masyarakat mempercayai kiai layaknya manusia sempurna.

Luasnya wawasan intelektual dan kesempurnaan moral telah berhasil menghadirkan kepercayaan masyarakat terhadap kiai. Pengakuan masyarakat terhadap kekuatan intelektual dan moral seorang kiai diperoleh melalui proses justifikasi dan legitimasi. Proses pengakuan yang terjadi diatas disebut sebagai *political formula* (formula politik) yang berarti suatu keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap figur tertentu yang berdasarkan oleh tuntunan moral terhadap kepemimpinan elite (Varma, 1975).

Kiai memiliki berbagai sumber daya yang dimiliki dan salah satunya yakni pesantren. Pesantren dapat dikatakan sebagai wadah yang dimiliki oleh kiai sehingga memperoleh kekuasaan dan kekuatan di wilayah-wilayahnya. Kiai dengan singgasana pesantrennya akan terus membangun relasi harmonis dengan jaringan kekuasaannya yang berada di luar Pesantren (Dhofier, 1982). Ketika apa yang dilakukan oleh kiai berjalan dengan lancar maka pesantren benar-benar telah menjadi kepanjangan tangan dari kekuatan seorang kiai. Aktor lain dalam lingkungan pesantren yang sangat dekat dengan kiai adalah santri, santri yang ada dalam lingkungan pesantren dikenal memiliki keterikatan secara emosional antar sesama alumni pesantren sehingga pada akhirnya keterikatan tersebut kembali memperkuat figur seorang kiai.

Keberhasilan kiai menduduki singgasana kepemimpinan dalam suatu wilayah tentu dengan melakukan berbagai cara. Kiai menjadi seorang pemimpin dalam politik tentu karena memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya. (Dijk, 2006) mendeskripsikan jaringan sosial sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dalam hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan sosial terdiri dari pelaku sosial-sebagai *nodes* (titik sambungan), yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan (*link*). Memanfaatkan jaringan sosial dilakukan kiai untuk mempersatukan suara masyarakat untuk dirinya, kiai tentu akan melakukan interaksi dan hubungan sosial kepada masyarakat secara luas yang kemudian terbentuk jaringan sosial yang dapat menghubungkan individu dan mendukung seorang kiai.

Tahun 2020, menjadi tahun dimana ada berbagai daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu. Salah satunya adalah Kabupaten Sumenep. Di akhir tahun ini telah dilaksanakan pilihan bupati yang tentunya akan menjadi pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Sumenep. Kabupaten

Sumenep sendiri saat ini akan dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan mengingat pemimpin sebelumnya sudah menjabat selama dua periode oleh karena itu akan menjadi menarik siapa yang akan memimpin Sumenep lima tahun kedepan. Kepastian yang dapat dilihat dari sekarang ini bahwa pemimpin Sumenep berasal dari golongan kiai atau kalangan pesantren mengingat bahwa kedua pasangan calon merupakan tokoh dengan *background* pesantren. Selain itu, Roda kepemimpinan Bupati Sumenep sebelum-sebelumnya juga selalu berkutat dengan kiai yang berlatar belakang Pesantren. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap kekuatan politik yang dimiliki kiai di Kabupaten Sumenep. Peneliti ingin melihat pemanfaatan jaringan sosial kiai yang dilatarbelakangi oleh kekuatan kiai yang kemudian mampu menyatukan orang-orang yang memiliki latar belakang pesantren yang sama (dari santri, ustad, hingga alumni), kemudian fokus kajian tentang pemanfaatan jaringan sosial pesantren ini tertuju pada pemilihan bupati Sumenep 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pernyataan latar belakang terkait dengan Kekuatan kiai pada Pemilu di Kabupaten Sumenep, maka ditarik rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan jaringan sosial kiai dalam Pilihan bupati Sumenep 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan jaringan sosial kiai dalam Pilihan bupati Sumenep 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kondisi perpolitikan di Indonesia berjalan dengan baik dan progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai untuk menjadi pemimpin di berbagai ruang pemerintahan diharapkan juga sejalan dengan fakta *track record* bagus dari kepemimpinan seorang kiai Pesantren.

2. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi terhadap pengembangan penelitian yang akan datang terkait dengan tema tersebut.